

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat penyerapan tenaga kerja merupakan tolok ukur penting yang merepresentasikan kemajuan perekonomian suatu daerah, sekaligus mengindikasikan kinerja sektor produktif di kawasan yang bersangkutan. Tersedianya peluang kerja yang cukup tidak hanya membantu dalam mendorong perkembangan ekonomi, tetapi juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka tingkat kemiskinan, serta penggunaan sumber daya manusia secara maksimal (Tarman et al., 2022). Di wilayah-wilayah yang menunjukkan taraf ekonomi serta tingkat realisasi penanaman modal yang relatif tinggi, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap dinamika pembangunan setempat. Seperti provinsi Banten, potensi untuk menciptakan lapangan kerja memegang kedudukan yang krusial bagi terpeliharanya kestabilan sosial sekaligus kestabilan ekonomi di tingkat regional. Provinsi Banten berfungsi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional yang didasari oleh cepatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan dan manufaktur. Posisi geografis yang strategis karena daerahnya yang dekat dengan ibu kota negara, serta adanya dukungan infrastruktur yang cukup memadai, sehingga menjadikan area ini sangat menarik untuk investasi, baik dari dalam negeri maupun asing.

Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penyerapan tenaga kerja dimaknai sebagai keseluruhan populasi yang tengah aktif bekerja dan terserap dalam kegiatan ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga

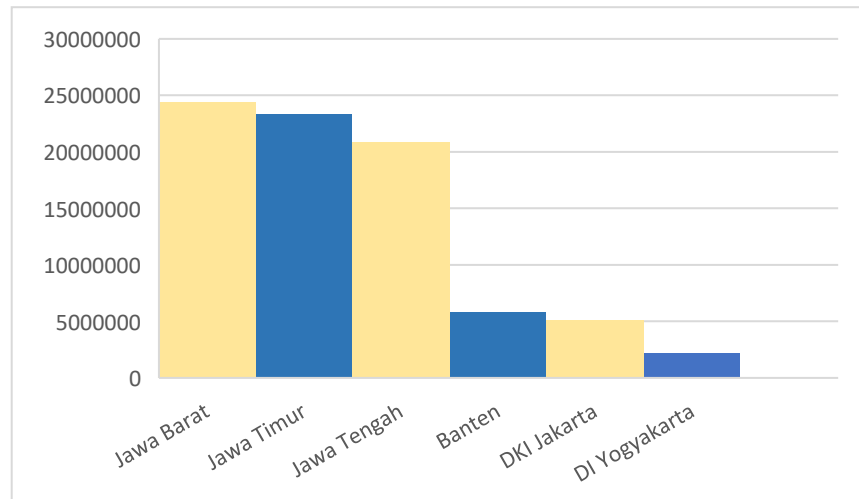
kerja kerap dijadikan indikator dalam mengevaluasi keadaan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri diharapkan mampu mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Namun, dalam praktiknya, peningkatan aktivitas ekonomi tidak menjamin terjadinya peningkatan terhadap tenaga kerja yang sebanding. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lapangan kerja tidak hanya di definisikan oleh tingkat aktivitas ekonomi, namun juga ada pengaruh dari peran karakteristik sektor dan kebijakan ekonomi yang berlaku di daerah tersebut.

Selain aspek daya serap terhadap tenaga kerja, struktur industri antar provinsi di wilayah Jawa juga memperlihatkan perbedaan yang dapat dilihat. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki 8.239 perusahaan Industri manufaktur kategori besar dan sedang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur terdapat sebanyak 6.151 perusahaan, diikuti Jawa Tengah terdapat 2.834 perusahaan besar dan 5.301 perusahaan menengah, sedangkan DKI Jakarta memiliki sekitar 1.359 perusahaan industri manufaktur. Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 617 perusahaan industri pengolahan berskala besar dan sedang. Sementara Provinsi Banten memiliki 3.397 perusahaan industri pengolahan skala menengah dan besar di tahun 2024.

Secara nasional, daya serap tenaga kerja antar provinsi di Pulau Jawa terlihat perbedaan cukup signifikan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, memiliki peran krusial dalam menyerap tenaga kerja Indonesia. Namun, terdapat ketimpangan yang cukup signifikan dalam jumlah penduduk yang bekerja antar provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan data pada periode 2024, Jawa Barat menempati posisi tertinggi sebagai wilayah dengan populasi produktif

paling banyak, peringkat selanjutnya oleh Jawa Timur serta Jawa Tengah. Sementara wilayah DKI Jakarta dan Banten berada pada kelompok dengan jumlah tenaga kerja yang lebih rendah.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Bekerja di Pulau Jawa

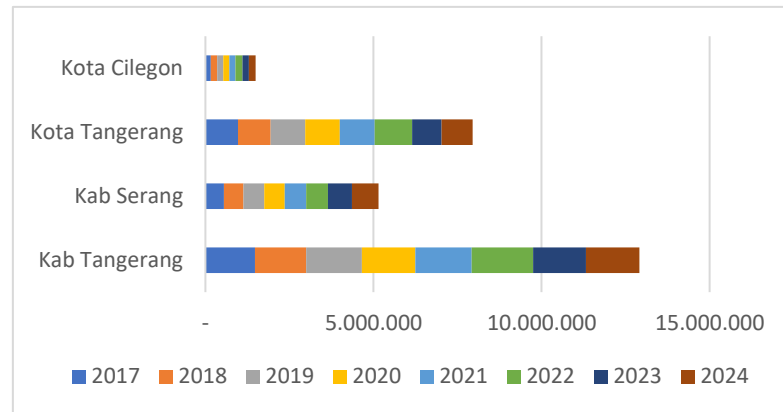


Sumber : Badan Pusat Statistik

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat daya serap tenaga kerja di wilayah Provinsi Banten sebesar 5,797,923 jiwa. Angka tersebut menempatkan Banten pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, namun masih berada sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, serta Jawa Tengah. Tingginya daya serap terhadap tenaga kerja di Banten dibandingkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta disebabkan oleh peran strategis, karena Provinsi Banten sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional melalui sektor industri pengolahan dan manufaktur. Dekatnya Provinsi Banten dengan ibu kota negara dan adanya infrastruktur yang cukup baik menjadikan provinsi ini memiliki daya tarik bagi realisasi berbagai proyek investasi. Pertumbuhan output ekonomi yang terlihat dari nilai PDRB di kawasan industri utama seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon juga menyebabkan efek

pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap permintaan faktor produksi, terutama tenaga kerja.

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017–2024



Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan pada gambar 1.2 terdapat perbedaan dalam jumlah pekerja yang terserap di berbagai wilayah, meskipun kawasan-kawasan tersebut memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Keadaan ini memperlihatkan jika laju penyerapan tenaga kerja tidak menjamin adanya pertumbuhan yang sebanding secara proporsional dengan intensitas kegiatan ekonomi atau dengan besarnya jumlah realisasi proyek investasi. Dalam studi ekonomi, teori ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi dan investasi secara umum mengungkapkan bahwa peningkatan upah minimum, pertumbuhan output ekonomi yang terlihat dari total PDRB, serta realisasi investasi yang ditandai dengan jumlah proyek dapat memperbesar kapasitas tenaga kerja yang terserap. Upah minimum yang ditetapkan secara proporsional atau pada kadar yang tidak berlebihan dianggap dapat mengembangkan daya beli dan sekaligus memotivasi tenaga kerja yang kemudian dapat mempengaruhi permintaan

agregat dan kegiatan produksi, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja (Sari & Setyowati, 2022).

Tingkat upah merupakan faktor yang penting terhadap penyerapan tenaga kerja, kondisi demikian disebabkan oleh pengaruhnya pada sisi permintaan maupun penawaran di pasar tenaga kerja. Salah satu faktor yang dapat berdampak terhadap laju penyerapan tenaga kerja ialah besaran upah minimum. Kebijakan penentuan upah minimum pada dasarnya menimbulkan berbagai dilema. Di satu sisi, peningkatan upah minimum bisa memberikan efek positif bagi pekerja karena dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan Masyarakat. Namun di sisi lain, kenaikan upah minimum juga bisa berpotensi menyebabkan dampak negatif, jika kenaikan upah tersebut justru mendorong perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja, yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran (Sholihah & Arisetyawan, 2025). Menurut teori Lawrence F. Katz (1986), besarnya tingkat upah yang lebih kompetitif mampu mendorong kenaikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Namun, pertumbuhan upah juga dapat menambah beban biaya manufaktur bagi perusahaan. Apabila kenaikan upah tersebut tidak disertai oleh peningkatan produktivitas akan mendorong perusahaan untuk membatasi perluasan jumlah pekerja, atau dalam beberapa situasi justru menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Ketentuan mengenai UMK mencerminkan kebijakan upah yang ditetapkan pemerintah daerah dan menjadi acuan standar bagi perusahaan di setiap daerah.

Upah minimum kabupaten/kota di wilayah penelitian, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2017-2024. Pada tahun

2017, UMK di keempat wilayah tersebut berada di kisaran Rp3,2 juta, dengan Kota Cilegon memegang angka tertinggi sebesar Rp3.331.997. Memasuki tahun 2024, standar upah ini telah meningkat pesat hingga mencapai rentang Rp4,5 juta hingga Rp4,8 juta, di mana Kota Cilegon tetap menjadi wilayah dengan UMK tertinggi mencapai Rp4.815.102. Kenaikan UMK tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, perbedaan tingkat UMK antar wilayah mengindikasikan adanya variasi kondisi ekonomi dan karakteristik industri di masing-masing daerah. Kenaikan upah tidak terjadi di Kabupaten Tangerang maupun di Kabupaten Serang selama periode 2021-2022, sementara Kota Tangerang dan Kota Cilegon menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Sholihah & Arisetyawan, 2025).

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator dalam menilai kondisi dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. PDRB mengukur kontribusi ekonomi yang berasal dari berbagai rangkaian kegiatan produksi yang berlangsung di sebuah kawasan dalam masa satu tahun atau periode tertentu. Peningkatan PDRB menunjukkan peningkatan produktivitas sektor jasa dan barang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pendapatan masyarakat. Dalam konteks Pembangunan wilayah, PDRB sering berfungsi sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi karena mencerminkan kemampuan keuangan dan potensi pendapatan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari peningkatan PDRB dapat meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor produksi, termasuk tenaga kerja, seiring dengan bertambahnya kebutuhan Perusahaan untuk memperluas operasionalnya. Oleh

karena itu, peningkatan PDRB secara teoritis diharapkan dapat menimbulkan kesempatan kerja baru serta memperluas peluang keterlibatan tenaga kerja (Tarman et al., 2022).

Namun, kenaikan PDRB belum tentu selalu disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang setara. Di beberapa daerah, pertumbuhan ekonomi yang pesat justru didorong oleh sektor-sektor yang memerlukan banyak modal dan berbasis teknologi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja cukup terbatas. Keadaan ini mengakibatkan terciptanya lapangan kerja baru yang tidak secepat laju pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, jumlah tenaga kerja yang diserap belum dapat menyaingi pertumbuhan Angkatan kerja yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya terukur dari tingginya PDRB, tetapi juga dari kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan peluang kerja yang cukup bagi Masyarakat. Oleh karena itu, upaya memahami mutu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah memerlukan pengkajian terhadap dua indikator yang sangat penting, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat penyerapan tenaga kerja. (Putri et al., 2022).

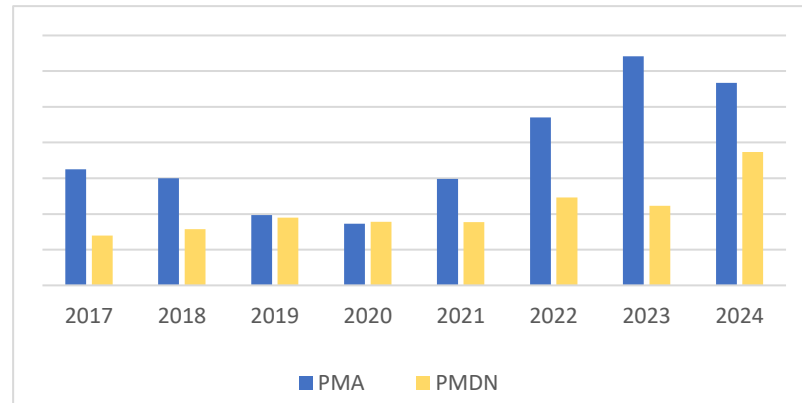
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada interval tahun 2017 hingga 2024, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2020 seluruh daerah mengalami penurunan ekonomi yang sejalan dengan melambatnya ekonomi nasional. Pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan output produksi sektor riil yang bersumber dari suatu wilayah

(Tarman et al., 2022). Peningkatan output ini diharapkan dapat memperluas peluang kerja dan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja. Meskipun begitu, tingkat pertumbuhan PDRB ternyata tidak senantiasa bergerak beriringan secara sebanding dengan laju peningkatan penyerapan tenaga kerja, karena dampaknya juga tergantung pada struktur ekonomi wilayah, karakteristik investasi, serta kebijakan ketenagakerjaan yang ada

Faktor investasi juga memiliki kontribusi langsung dalam memperkuat basis produksi. Ketika kemampuan produksi meningkat, keperluan terhadap sumber daya manusia pun bertambah. Hal ini menegaskan bahwa investasi memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian dengan meningkatkan kemampuan produksi dan memfasilitasi ekspansi bisnis. Peningkatan investasi mencerminkan adanya aktivitas pembangunan ekonomi yang berpotensi memperluas skala produksi di berbagai sektor. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja melalui meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi, termasuk tenaga kerja (Satoto, 2023).

Secara umum, realisasi investasi di suatu daerah dapat bersumber dari dua jenis penanaman modal, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Kedua jenis investasi tersebut memiliki karakteristik dan kontribusi yang berbeda terhadap perekonomian suatu wilayah, sehingga penting untuk melihat perbandingan keduanya sebelum menentukan fokus kajian penelitian ini.

Gambar 1. 3 Perbandingan PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2017-2024



Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Banten cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada hampir seluruh periode pengamatan, terutama sejak tahun 2021 hingga 2024, di mana selisihnya semakin melebar. Dominasi nilai PMA ini mengindikasikan bahwa investor asing memiliki peran yang lebih besar dibandingkan investor domestik dalam mendorong aktivitas ekonomi di kawasan industri utama Provinsi Banten. Mengingat dominasi nilai realisasi PMA dibandingkan PMDN tersebut, serta besarnya potensi pengaruh investasi asing terhadap struktur tenaga kerja khususnya terkait karakteristik investasi asing yang cenderung berorientasi pada teknologi dan padat modal penelitian ini memilih untuk berfokus pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu variabel independen dalam mengkaji pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

Provinsi Banten dengan kawasan industri utamanya seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon secara konsisten menjadi tujuan utama investasi asing. Nilai PMA di wilayah-wilayah

tersebut mencerminkan akumulasi modal internasional yang masuk untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkuat basis industri manufaktur serta jasa di daerah tersebut (Astuti & Gunawan, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berdampak negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa peningkatan arus masuk investasi asing belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perluasan kesempatan kerja di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena realisasi PMA di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada industri berbasis modal dari pada industri padat karya (Hasmarini & Budi, 2025). Penggunaan teknologi tinggi dalam aktivitas investasi tersebut terbukti lebih produktif dan efisien, sehingga perusahaan hanya membutuhkan sedikit pekerja untuk menghasilkan produk yang sama.

Namun, dari beberapa hasil di berbagai wilayah menunjukkan bahwa interaksi antar variabel ekonomi itu tidak selalu linier seperti yang diasumsikan dalam teori. Berbagai kajian empiris mengungkapkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan upah minimum terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja bersifat heterogen dapat bernilai positif, negatif, maupun tidak signifikan secara statistik. Variasi hasil tersebut sangat bergantung pada karakteristik demografis dan ekonomi suatu daerah, serta komposisi struktural sektor yang mendominasi perekonomiannya. Di samping itu, pertumbuhan PDRB tidak senantiasa diiringi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara proporsional, terutama apabila ekspansi ekonomi lebih banyak ditopang sektor-sektor yang memiliki karakteristik padat modal serta mengutamakan substitusi

terhadap peran tenaga kerja melalui teknologi (Maryati et al., 2021). Sejalan dengan itu, pelaksanaan investasi di sejumlah kasus tidak menimbulkan dampak substansial pada penyerapan tenaga kerja pada saat investasi tersebut lebih mengedepankan efisiensi produksi atau penerapan teknologi yang membutuhkan modal besar. Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang sebelumnya, peneliti menilai bahwa diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif untuk menganalisis secara mendalam terkait **“Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Banten”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan permasalahan dalam kajian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten?
3. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten

2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten
3. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

1.4 Ruang Lingkup

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi resmi yang tersedia secara terbuka di BPS Provinsi Banten. Kajian difokuskan pada fenomena penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten dengan melibatkan tiga variabel independen, yakni Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penanaman Modal Asing (PMA). Secara geografis, lingkup wilayah penelitian mencakup empat kawasan industri utama, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah berupa rekomendasi dan pertimbangan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah ketika merumuskan kebijakan tepat sasaran untuk memperluas lapangan kerja serta memicu peningkatan perekonomian di Provinsi Banten.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Pembaca

Harapan yang terkandung dalam kajian ini adalah agar mampu memberikan manfaat dan berfungsi sebagai sumber referensi ilmiah akademis yang relevan bagi peneliti di masa depan untuk memperkuat argumentasi dalam kajian yang mengangkat tema serupa maupun variabel penelitian yang berkaitan.